

BENTUK DAN FUNGSI TANYA JAWAB DALAM PERSIDANGAN PIDANA DI PENGADILAN WILAYAH SURAKARTA

Dwi Purnanto, Henry Yustanto, Miftah Nugroho

Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Universitas Sebelas Maret

1. Pendahuluan

Pada dasarnya penggunaan bahasa dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satu aspek yang mempengaruhi penggunaan bahasa seseorang adalah ranah (*domain*). Ranah adalah konstelasi dari peserta percakapan, latar, dan topik. Berdasarkan ranah tersebut seseorang akan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Dengan kata lain, preferensi bahasa apa yang akan digunakan di dalam komunikasi akan dipengaruhi ranah bahasa yang digunakan. Misalnya, penggunaan bahasa pada ranah rumah tentunya berbeda dengan penggunaan bahasa pada ranah sekolah, ranah agama, atau ranah pengadilan.

Dari berbagai ranah yang ada, ranah pengadilan merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang memiliki keunikan tersendiri. Penggunaan bahasa pada ranah ini melibatkan profesi khusus yang menggunakan bahasa secara khas. Profesi khusus tersebut adalah hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Adanya profesi khusus tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa yang khas yang bertujuan untuk menunjukkan identitas mereka. Hal ini tercermin pada pemilihan kosa kata atau penggunaan kalimat yang panjang-panjang. Implikasi dari penggunaan bahasa yang khas tersebut adalah kelompok profesi ini secara tidak langsung mengomunikasikan gagasan-gagasan yang hanya mereka pahami dengan baik, tetapi tidak dipahami oleh masyarakat di luar kelompoknya.

Selain penggunaan bahasa yang khas, aspek lain dari penggunaan bahasa di ranah pengadilan yang menarik untuk dikaji adalah percakapan yang terjadi antarpartisipan di dalam persidangan. Percakapan pada ranah pengadilan, terutama di persidangan, adalah percakapan yang bersifat institusional. Artinya, setiap peserta yang terlibat di dalam persidangan tidak dapat bebas berbicara. Ada seseorang yang mengatur jalannya pergantian bicara. Dengan adanya orang yang mengatur jalannya pergantian bicara, setiap peserta percakapan dapat berbicara ketika mendapat izin dari orang yang berwenang mengatur percakapan. Hal ini berbeda dengan percakapan biasa. Pada percakapan biasa setiap peserta percakapan dapat bebas berbicara. Giliran berbicara pada percakapan tersebut tidak diatur secara ketat. Seseorang tidak perlu menunggu izin dari orang lain untuk berbicara pada percakapan ini.

Pada dasarnya komunikasi dalam persidangan bersifat dialogis. Artinya komunikasi yang berlangsung dalam persidangan bersifat dua arah. Bentuk atau wujud interaksi dalam persidangan lazimnya berupa tanya jawab. Pihak yang sering menyampaikan pertanyaan adalah hakim, sedangkan pihak yang sering mengutarakan jawaban adalah saksi atau terdakwa. Namun pada kesempatan lain, jaksa dan penasihat hukum dapat menyampaikan pertanyaan kepada saksi atau terdakwa dan juga mengutarakan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim. Adapun pihak yang sering menjawab adalah saksi atau terdakwa. Namun demikian, pada saat tertentu jaksa atau penasihat hukum juga menyampaikan jawaban yang dikemukakan hakim.

Dari fenomena tanya jawab yang terdapat di persidangan, fenomena tanya merupakan fenomena yang menarik untuk diungkap dan dibahas secara mendetail. Pada saat menyampaikan pertanyaan, hakim atau jaksa atau penasihat hukum tidak akan melakukannya dengan cara yang sama. Artinya bentuk pertanyaan yang digunakan oleh hakim, jaksa, atau penasihat hukum berbeda-beda. Perbedaan

bentuk pertanyaan yang muncul dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, perbedaan bentuk pertanyaan yang digunakan oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum perlu diungkap dan dideskripsikan supaya terdapat gambaran yang komprehensif perihal bagaimana strategi menggali informasi kepada saksi dan terdakwa di persidangan.

Di samping bentuk, aspek lain yang tidak kalah pentingnya untuk diungkap adalah fungsi dari pertanyaan itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Tsui bahwa istilah pertanyaan '*question*' dapat dikaji secara sintaktik atau pragmatik (Coulthard, 2002). Berkenaan dengan pernyataan Tsui tersebut, pembahasan pertanyaan dalam persidangan perlu juga melibatkan fungsi. Dalam teori tindak tutur terdapat sebuah dalil bahwa suatu tuturan juga mengandung tindakan. Dengan kata lain, sebuah tuturan memiliki fungsi untuk apa diujarkan. Demikian pula tuturan pertanyaan yang terdapat di dalam persidangan tentunya memiliki fungsi. Fungsi ini lazimnya dipengaruhi oleh motivasi penutur (dalam hal ini hakim, jaksa, dan penasihat hukum). Motivasi ini akan membuat fungsi yang terkandung dalam tuturan pertanyaan menjadi berbeda-beda pula. Dengan demikian, pembahasan fungsi ini akan menyertai pembahasan bentuk perihal pertanyaan yang terdapat dalam persidangan.

2. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengkaji pemakaian bahasa di ranah hukum telah dilakukan oleh Bhatia (1983 dan 1993), Marcelino (1993), Bustanul Arifin (1997), Djatmika dan kawan-kawan (1999 dan 2001), Djatmika (2003), dan Triwati (2004). Bhatia (1983 dan 1993) meneliti pemakaian bahasa hukum dengan judul *Simplification vs Easification – The Case of Legal Texts and Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. Penelitian tersebut mengaplikasikan teori *Simplification* dan *Easification* untuk memahami teks hukum berbahasa Inggris secara lebih mudah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Marcelino (1993) dengan judul *Analisis Percakapan: Telaah Tanya Jawab di Meja Hijau*. Penelitian tersebut menyimpulkan dua hal. *Pertama*, terdapat perbedaan cara yang digunakan oleh terdakwa untuk menanggapi pernyataan-pertanyaan penyelidik. *Kedua*, jawaban yang disampaikan terdakwa memperlihatkan ketidakkooperatifan.

Selanjutnya, penelitian Arifin (1997) dengan judul *Analisis Tanya-Jawab dalam Peristiwa Tutar di Pengadilan* mengkaji pemakaian bahasa di ranah hukum dengan tiga tujuan. Tiga tujuan tersebut adalah (1) mendeskripsikan kekhasan bentuk pertanyaan yang digunakan dalam sidang di pengadilan, (2) mendeskripsikan berbagai jenis fungsi pragmatis pertanyaan yang digunakan dalam sidang di pengadilan, dan (3) mendeskripsikan jawaban dari terdakwa atau saksi terhadap pertanyaan hakim, jaksa, dan pembela.

Penelitian yang selaras dengan Bathia dilakukan oleh Djatmika dan kawan-kawan (1999) dengan judul *Strategi Memahami Teks Hukum: Sebuah Pendekatan Sistemik Fungsional*. Penelitian ini menggunakan teori Sistemik Fungsional untuk menelaah aspek kebahasaan yang membuat kesan rumit dan kusut teks-teks hukum bahasa Indonesia. Selanjutnya, Djatmika dan kawan-kawan (2001) meneliti teks-teks di dalam KUHP dengan judul penelitian *Pemudahan Teks Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Sebuah Analisis Wacana*. Penelitian ini bertujuan menganalisis teks-teks hukum di dalam KUHP dengan piranti kohesi. Penelitian tersebut dilanjutkan oleh Djatmika (2001) dengan judul *Kohesi Teks Hukum Berbahasa Indonesia: Sebuah Upaya Pemudahan dengan Analisis Wacana*. Penelitian ini berfokus pada penggunaan kohesi dan perumusan strategi pemudahan untuk memahami teks hukum bahasa Indonesia.

Penelitian selanjutnya dilakukan Triwati (2004) dengan judul *Analisis Register terhadap Akta Otentik*. Penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan bentuk register pada akta otentik, mendeskripsikan

karakteristik pemakaian register pada akta otentik, dan menganalisis fungsi register pada akta otentik dilihat dari konteks pemakaiannya.

3. Kajian Teori

3.1 Sociolinguistik

Sociolinguistik sebagai salah satu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat (Hudson, 1992; Holmes, 2001). Dalam pandangan sociolinguistik, bahasa tidak lepas dari masyarakat sebagai penggunaanya. Sociolinguistik berusaha menjelaskan ihwal mengapa setiap orang berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Dengan kata lain, seseorang akan berbicara secara berbeda dengan memperhatikan konteks sosial tempat ia tinggal. Ketika seseorang akan berbicara, ia akan memperhatikan siapa mitra tuturnya, waktu tuturan diujarkan, tempat tuturan dikemukakan, topik yang dibicarakan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, seseorang baru akan menentukan menggunakan bahasa yang akan dipakai. Pendek kata, dalil sociolinguistik yang terkenal yaitu *who speaks, what languages to whom, when, where, and to what end* akan diperhatikan secara seksama oleh seseorang yang berbicara kepada orang lain.

3.2 Situasi Tutur dan Tindak Tutur

Untuk mengkaji kebiasaan cara komunikasi di dalam suatu komunitas tutur, seorang peneliti harus mengamati unit-unit interaksi, yaitu situasi tutur (*speech situation*), peristiwa tutur (*speech event*), dan tindak tutur (*speech act*). Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur menjadi bagian dari situasi tutur. Situasi tutur adalah situasi yang dikaitkan dengan tuturan dan tidak ada kaitannya dengan linguistik, misalnya: upacara, pertenggaran, percintaan, dan sebagainya. Peristiwa tutur berciri komunikatif dan terikat dengan aturan cara bertutur. Peristiwa tutur dapat terdiri atas satu atau lebih tindak tutur. Misalnya gurauan yang terjadi dalam suatu

percakapan (peristiwa tutur) dan terjadi di dalam suatu pesta (situasi tutur). Dimungkinkan pula suatu tindak tutur sekaligus mencakup peristiwa tutur dan situasi tutur, misalnya tindak tutur berdoa.

Tindak tutur merupakan tataran yang sederhana dan rumit, karena kedudukannya di dalam komunikasi merupakan jenjang terendah, namun rumit sebab berkaitan dengan pragmatik. Hymes berpendapat bahwa tindak tutur dipengaruhi oleh konteks sosial, bentuk gramatikal, dan intonasi. Tindakan yang terkandung dalam tuturan atau lebih sebagai maksud Pn akan beragam sesuai dengan latar belakang Pn maupun situasi tuturan sehingga akan diwujudkan dengan bentuk-bentuk kebahasaan yang berbeda pula.

3.3 Komponen Tutur

Selain situasi, peristiwa, dan tindak tutur masih ada konsep lain yang cukup penting, yaitu komponen tutur. Komponen tutur, misalnya akan meliputi akronim dari SPEAKING. Konsepnya bisa dijelaskan pada setiap awal huruf, yaitu meliputi:

S = *Setting and Scene*, yang merujuk latar dan suasana.

P = *Partisipants*, mencakup tidak hanya Pn dan Mt, tetapi juga *adressor* (juru bicara) yang terkadang siapa yang diwakili tidak berada di tempat. dan *audience* (pendengar).

E = *End* (tujuan), merujuk pada maksud dan tujuan tuturan.

A = *Act sequence* (urutan tindak), mencakup bentuk pesan (bagaimana pesan itu disampaikan dan isi pesan (apa yang disampaikan).

K = *Key* (kunci), yang mengacu pada bagaimana suatu tuturan disampaikan.

I = *Instrumentalities* (piranti, perabotan), mencakup saluran (lisan, tulis, atau *e-mail*) dan bentuk tutur (misalnya mengacu pada bahasa, dialek, kode, register, dan sebagainya)

N = *Norms* (norma), mencakup norma interaksi dan norma

interpretasi dalam pertuturan.

G = *Genre*, yang mengacu pada jenis-jenis wacana yang dipakai

3.4 Pragmatik

Istilah pragmatik pada awalnya dikemukakan oleh Charles Morris (Levinson, 1983) dalam kajian semiotik. Menurut Morris, semiotik terbagi menjadi tiga macam, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis didefinisikan sebagai kajian ihwal hubungan formal satu tanda dengan yang lain. Sementara itu, semantik adalah kajian ihwal hubungan tanda dengan objek yang mana tanda tersebut dapat dipergunakan. Adapun pragmatik merupakan kajian perihal hubungan antara tanda dengan penafsirnya.

Berkenaan dengan definisi pragmatik, terdapat berbagai jenis definisi dan batasan yang berbeda dari berbagai pakar linguistik. Levinson (1983: 21) menyatakan bahwa pragmatik adalah kajian ihwal hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar untuk penjelasan tentang pemahaman bahasa. Dalam pada itu, Richards, Plat, dan Weber (1985) berpendapat bahwa pragmatik adalah kajian ihwal penggunaan bahasa, terutama hubungan antara kalimat dan konteks serta situasi pemakaian kalimat tersebut. Sementara itu, Fasold (1996: 119) mengemukakan bahwa pragmatik adalah kajian perihal penggunaan konteks untuk memahami inferensi sebuah makna. Yule (1996: 3) merumuskan definisi pragmatik kajian ihwal maksud penutur, kajian perihal makna kontekstual, kajian ihwal bagaimana mendapatkan lebih yang dikomunikasikan daripada yang dikatakan, dan kajian ihwal ungkapan dari jarak relatif. Thomas (1996: 22) mendefinisikan pragmatik sebagai makna di dalam interaksi. Lebih lanjut Thomas menyatakan bahwa membuat makna adalah proses dinamis, yang melibatkan negosiasi makna antara pembicara dan pendengar, konteks ucapan (fisik, sosial, linguistik), dan makna potensial dari sebuah ucapan. Huang (2007: 2) mengemukakan bahwa pragmatik adalah studi sistematis makna berdasarkan atau bergantung

pada penggunaan bahasa. Topik pusat penyelidikan pragmatik meliputi implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan deiksis.

3.5 Konteks

Konteks dalam pragmatik memiliki kedudukan penting. Setiap peristiwa kebahasaan yang dianalisis dengan pendekatan pragmatik tentu akan melibatkan konteks. Dengan konteks seseorang dapat memahami maksud sebuah ujaran yang tampak ambigu. Dengan konteks juga seseorang dapat mengidentifikasi apa yang tersirat dari sebuah tuturan.

Leech (1983) memerikan konteks sebagai salah satu komponen dalam situasi tutur. Menurut Leech, konteks didefinisikan sebagai aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan. Leech menambahkan dalam definisinya tentang konteks yaitu sebagai suatu pengetahuan latar belakang yang secara bersama dimiliki oleh penutur dan petutur dan konteks ini membantu petutur menafsirkan atau menginterpretasi maksud tuturan penutur.

Yule (1996) membahas konteks dalam kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi referen-referen yang bergantung pada satu atau lebih pemahaman orang itu terhadap ekspresi yang diacu. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Yule membedakan konteks dan koteks. Konteks ia definisikan sebagai lingkungan fisik dimana sebuah kata dipergunakan. Koteks menurut Yule adalah bahan linguistik yang membantu memahami sebuah ekspresi atau ungkapan. Koteks adalah bagian linguistik dalam lingkungan tempat sebuah ekspresi dipergunakan.

Yan Huang (2007: 13-14) membicarakan konteks dalam kaitannya dengan nosi dasar semantik dan pragmatik. Menurut Huang, konteks dipergunakan secara luas dalam kepustakaan linguistik, namun sulit untuk memberikan definisi yang tepat. Konteks dalam arti luas mungkin diartikan sebagai pengacuan terhadap ciri-ciri yang relevan dari latar yang dinamis atau dalam

lingkungan tempat unit linguistik dipergunakan secara sistematis. Selanjutnya, konteks disusun atas tiga jenis, yaitu konteks fisik, konteks linguistik, dan konteks pengetahuan umum. Konteks fisik mengacu pada latar fisik sebuah tuturan. Misalnya tuturan (3) di bawah ini penafsirannya bergantung pada pengetahuan terukur dari konteks fisik, yaitu lokasi ruang-waktu dari tuturan.

3.6 Kalimat Tanya

Kalimat tanya merupakan salah satu jenis kalimat selain kalimat berita dan kalimat perintah. Pengelompokan ketiga jenis kalimat tersebut lazimnya didasarkan pada segi makna (lihat Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, 1997) atau didasarkan fungsinya dalam hubungan situasi (lihat Ramlan, 2001).

Berkenaan dengan kalimat tanya atau kalimat interogatif, beberapa ahli bahasa memberi definisi yang hampir sama. Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1997: 288) dinyatakan bahwa kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Sementara itu, Ramlan (2001: 28) menyatakan bahwa kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat ini memiliki pola intonasi dengan nada akhir naik atau nada suku terakhir yang lebih tinggi sedikit. Adapun Kridalaksana (2008: 104) mengemukakan definisi kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi interogatif dan lazimnya mengandung makna pertanyaan. Selaras dengan pendapat Ramlan dan Kridalaksana, Tsui dengan mengutip pendapat Quirk dkk. menyatakan bahwa kalimat tanya adalah salah satu kelas semantik yang digunakan terutama untuk mencari informasi (Coulthard, 2002). Berdasarkan pendapat para ahli bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat tanya adalah kalimat yang isinya atau maknanya atau fungsinya untuk menanyakan sesuatu atau seseorang. Selain itu, kalimat tanya juga mengandung intonasi interogatif. Nada interogatif ini ditandai dengan nada akhir naik atau nada suku terakhir yang lebih tinggi sedikit.

Perihal jenis-jenis kalimat tanya, Tsui dengan mengutip pendapat Quirk dkk berpendapat bahwa kalimat tanya dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu (1) kalimat tanya biasa, yaitu kalimat tanya yang menggunakan kata tanya: apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan dan bila, ke mana, dari mana, dari apa, dari siapa, dengan apa, dengan siapa, untuk apa, untuk siapa, berapa dan lain-lain, (2) kalimat tanya yang hanya menghendaki jawaban ya atau tidak (pertanyaan ya/tidak), dan (3) kalimat tanya yang mengharapkan jawaban lebih dari satu atau dua pilihan yang disajikan dalam pertanyaan atau pertanyaan alternatif (Coulthard, 2002:89).

Selain dikaji secara sintaktik, kalimat tanya juga dapat ditelaah secara pragmatik. Jika ditelaah secara pragmatik, istilah kalimat tanya alih-alih menjadi tuturan tanya. Tuturan tanya termasuk ke dalam salah satu jenis tindak ilokusi. Menurut Lyons kondisi tepat '*felicity conditions*' tuturan tanya adalah penutur sebaiknya tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan yang disampaikan (Coulthard, 2002). Sementara itu, Searle juga menyatakan bahwa tuturan tanya merupakan salah satu jenis tindak ilokusi.

Berkenaan dengan fungsi yang dimiliki oleh tuturan tanya, Tsui mengemukakan bahwa tuturan tanya memiliki tujuh fungsi, yaitu fungsi meminta, fungsi mencari informasi, fungsi mengonfirmasi, fungsi menyetujui, fungsi meminta komitmen, fungsi mengklarifikasi, dan fungsi mengulang (Coulthard, 2002). Sementara itu Allen (1978) menyatakan bahwa fungsi tuturan tanya meliputi (1) meminta informasi, meminta izin, meminta konfirmasi; (2) mengubah topik pembicaraan; (3) meminta penjelasan, pengulangan, pembuktian kebenaran, atau meminta informasi yang lebih terperinci; dan (4) mengembangkan percakapan (Abdul Rani dkk, 2006: 230).

4. Hasil Penelitian

4.1 Bentuk Pertanyaan dalam Persidangan

Di dalam strategi tanya jawab dan prinsip-prinsip interaksi dalam persidangan pidana di pengadilan wilayah Surakarta kalimat-kalimat tanya yang dipakai oleh para pelaku persidangan dapat digambarkan sebagai berikut.

4.1.1 Kalimat Tanya Biasa

Kalimat tanya secara formal ditandai dengan hadirnya kata tanya seperti: *apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, dan di mana*. Adapun bentuk kalimat tanya yang ditemukan dalam situasi persidangan secara umum adalah tipe 5W + 1H. Hal ini wajar karena bentuk ini biasa digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang bertujuan meminta penjelasan atau menggali informasi.

Data di bawah ini menunjukkan adanya pemakaian pemarkah kalimat tanya: *apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana*.

(1) H: "Ada hubungan keluarga?"

S: "Ada."

H: "**Apa** itu?"

S: "Adik kandung."

(2) H: "*Sopo sing ngeterke?*"

T: "Agus."

H: "Agus. Kamu kenal Agus **di mana?**"

T: "Di Tepus."

(3) H: Namanya **siapa?**

T: Marsono.

H: Umurnya berapa tahun?

T: 25 tahun.

(4) H: Baik **kapan** mau dituntut?

J: Mohon waktu dua minggu

(5) PH : **Kenapa** ini dibiarkan lolos?

S : Ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan karena sekwan itu diajak membahas ya dalam kompetensi membahas.

PH : Itu pada tahap penyusunan konsep RAPBD perubahan atau pada pembahasa di DPRD?

S : Konsep.

(6) J3 : **Mengapa** saudara saksi tidak.....yang bersangkutan?

S2 : Belum

J3 : **Mengapa** saudara saksi tidak....yang bersangkutan>

S2 : Karena yang bersangkutan

H : Dia tidak tahu ini yang menyelesaikan itu?

J3 : Tapi dia kan minta pertanggung jawaban....

(7) H : Itu pendapat, Bu. Maka simpulkan sendiri saja. Jadi katakan sendiri, simpulkan sendiri. Nggak usah Kalau diajak katakan begitu ya simpulkan sendiri saja. Masing-masing

Bagaimana tadi, Bu? Sudah? Sudah. Saudara-saudara **bagaimana** saudara-saudara atas keterangan saksi ini, ada yang keberatan nggak?

J : Saya keberatan, Pak.

Pada (1) – (7) di atas contoh penggunaan kalimat tanya biasa atau kalimat tanya yang menggunakan pemarkah tanya. Pada (1) ditandai dengan pemarkah tanya apa yang berfungsi untuk menanyakan *benda*, *tumbuh-tumbuhan*, dan *hewan*. Kata *apa* digunakan oleh hakim untuk menanyakan hubungan kekerabatan saksi dengan orang yang tersangkut dalam kasus. Pada (2) ditandai dengan pemarkah tanya *di mana*. Kata *di mana* berfungsi untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan tempat. Kata *di mana* digunakan oleh hakim untuk menanyakan tempat di mana terdakwa berkenalan dengan

Agus. Sementara itu, pada (3) pemarkah yang digunakan adalah *siapa*. Kata *siapa* digunakan untuk menanyakan seseorang atau nama seseorang. Pada (3) hakim menggunakan pemarkah tanya *siapa* untuk menanyakan nama seseorang. Adapun pemarkah *kapan* digunakan pada (4) berfungsi untuk memperoleh informasi tentang waktu. Pada (4) hakim bertanya kepada jaksa berkenaan dengan waktu penuntutan. Hakim bertanya dengan menggunakan pemarkah tanya *kapan* karena memang pertanyaan tersebut berkaitan dengan waktu.

Kata tanya *mengapa*, *kenapa* juga banyak digunakan dalam membangun kalimat tanya di dalam persidangan. Pemarkah tanya ini digunakan untuk menanyakan perbuatan. Pada (5) kata *kenapa* digunakan untuk memperoleh jawaban tentang perbuatan meloloskannya anggaran pada suatu rapat. Sementara itu, pada (6) kata *mengapa* digunakan jaksa untuk menanyakan kepada saksi ihwal mengapa saksi tidak meminta pertanggungjawaban terdakwa. Adapun kata *bagaimana* digunakan untuk menanyakan keadaan. Pada (6) pemarkah *bagaimana* dipakai hakim bertanya kepada jaksa untuk mengetahui keadaan jaksa apakah jaksa keberatan dengan keterangan yang telah diberikan oleh saksi.

4.1.2 Kalimat tanya yang hanya menghendaki jawaban ya atau tidak (pertanyaan ya/tidak)

Bentuk pertanyaan yang menghendaki jawaban ya / tidak dapat dipakai untuk menyatakan setidaknya tiga masalah. Pertama, pertanyaan yang diajukan untuk jawaban 'ya', kedua mengharapkan jawaban 'tidak', dan ketiga tanpa jawaban. Akan tetapi, dalam komunikasi verbal biasanya diwujudkan dengan dua pertanyaan untuk jawaban "ya" (pertanyaan positif) dan jawaban 'tidak' (untuk pertanyaan negatif). Di bawah ini data yang menunjukkan penggunaan kalimat tanya ya/tidak.

(8) H : Ada tambahan lagi? Kalau begitu tinggal nunggu putusan sekarang. Dah siap?

J : Sampai minggu depan Pak. Tunda satu minggu.

H : Tunda satu minggu. Pak J minta waktu satu minggu **ya?**
Sekitar tanggal 25.

J : **Ya.**

(9) H: "Lainnya itu? Dulu kredit **ndak?**"

S: "**Nggak.**"

.....

PH : Apakah anggaran biaya operasional penunjang kegiatan dapat dibayarkan oleh pemegang kas daerah hanya dengan menyerahkan SK pimpinan DPRD?

S : **Tidak.**

Pada (8), pertanyaan ini cenderung dipakai untuk memperoleh konfirmasi dari pihak penanya mengenai konteks permasalahan yang sedang ditanyakan. Pada (8) dialog terjadi antara hakim dan jaksa. Pada konteks tersebut, jaksa meminta pembacaan tuntutan ditunda satu minggu. Untuk menegaskan permintaan jaksa, hakim menanyakan/ingin mempertegas kembali permintaan jaksa dengan menggunakan kalimat tanya bermarkah *ya*. Atas pertanyaan ini jaksa meng-iya-kan pertanyaan hakim pertanda apa yang ditanyakan hakim benar. Sementara itu, pada (9) terdapat pemakaian kalimat tanya yang direspons dengan jawaban 'tidak' (pertanyaan negatif). Yang menarik adalah jawaban tidak direalisasikan dalam berbagai bentuk yaitu bentuk yang kurang baku seperti *ndak*, *nggak*.

4.1.3 Kalimat tanya yang mengharapkan jawaban lebih dari satu atau dua pilihan yang disajikan dalam pertanyaan (pertanyaan alternatif)

Bentuk kalimat tanya yang ketiga yang dipakai dalam peristiwa persidangan ini adalah pertanyaan alternatif. Bentuk kalimat tanya ini bisa menyerupai kalimat tanya yang menghendaki jawaban 'ya/tidak',

tetapi biasanya jawaban atas pertanyaan alternatif ini bisa lebih dari satu jawaban.

Bentuk kalimat tanya alternatif ini biasanya menggunakan pemarkah tanya **yang mana, atau** dan **untuk apa saja**. Hal ini dapat dilihat pada data berikut:

(10) H : Terima kasih. Terus pelaksanaannya **yang mana**?

S : Pelaksanaannya yang bawah. Itu yang bawah

Pada (10) pemakaian kalimat tanya alternatif yang diajukan oleh penutur kepada mitra tutur menggunakan pemarkah tanya *yang mana*. Munculnya pemarkah ini mengakibatkan mitra tutur harus menjawab sesuai dengan jawaban yang benar menurutnya sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia di pikiran atau dalam hal ini jawaban yang sesuai dengan fakta persoalan yang sedang disidangkan.

4.1.4 Kalimat tanya yang tidak mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang disajikan (pertanyaan retorik)

Pada umumnya semua kalimat tanya yang dipakai dalam peristiwa persidangan ini mengehendaki suatu jawaban atas isi pertanyaan tersebut. Akan tetapi, ada pula pertanyaan yang sama sekali tidak mengehendaki jawaban, pertanyaan semacam ini disebut *petanyaan retorik*. Pertanyaan retorik ini biasa dipakai dalam percakapan-percakapan lain di mana pendengar sudah mengetahui atau dianggap sudah mengetahui jawabannya. Contoh penggalan peristiwa tutur yang menunjukkan adanya penggunaan kalimat retorik sebagai berikut:

(11) J : Sudah Saudara ketua.

H : Waktu itu Saudara lari **ya**?

Pada (11) jelas menunjukkan sebenarnya penanya sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang diajukan dan tidak perlu jawaban. Hal

itu terjadi karena pada kenyataannya pertanyaan itu hanya dipakai untuk menegaskan apa yang sudah diketahuinya.

4.2 Fungsi Pertanyaan dalam Persidangan

Pertanyaan sebagai satuan lingual dapat diperikan berdasarkan bentuk dan dapat juga diperikan berdasarkan fungsi. Perian berdasarkan fungsi ini berarti perian yang hendak menjelaskan fungsi rangkaian tanya jawab itu, terutama fungsi pertanyaan. Dalam hal ini fungsi apa saja yang terkandung dalam tuturan pertanyaan. Berkenaan dengan hal tersebut, analisis ini akan menjelaskan fungsi atau daya ilokusi (*illocutionary force*) dari tuturan pertanyaan yang sering dikemukakan di dalam persidangan. Berikut ini paparan yang berisi berbagai fungsi tanya jawab di dalam persidangan.

4.2.1 Bertanya

Tuturan pertanyaan yang mengandung fungsi bertanya berarti bahwa tuturan itu dikemukakan dengan maksud atau tujuan untuk bertanya sesuatu. Fungsi bertanya di dalam persidangan dilakukan manakala penutur belum mengetahui informasi tentang sesuatu hal. Berikut contoh penggunaan fungsi bertanya dalam persidangan.

(12) H : Yang belum dibayar, yang belum dibayar itu

sebetulnya hak siapa?

J : Haknya Padno (gaduh) yang bukan haknya Padno yang 156 yang belum jadi.

Konteks: Tuturan hakim kepada jaksa pada persidangan pidana korupsi di PN Klaten.

(13) H: "Ada hubungan keluarga?"

S: "Ada."

H: "**Apa itu?**"

S: "Adik kandung."

Konteks: Tuturan hakim kepada saksi pada persidangan pidana pencurian di PN Klaten

Pada (12) dan (13) tuturan yang mengandung fungsi bertanya adalah *Yang belum dibayar, yang belum dibayar itu sebetulnya hak siapa? dan apa itu?*. Pada (12) penutur yaitu hakim bertanya kepada jaksa dengan tujuan ingin menggali informasi perihal hak yang belum dibayar oleh terdakwa. Sementara itu, pada (13) penutur yaitu hakim menyampaikan pertanyaan dengan maksud ingin mengetahui hubungan persaudaraan antara saksi dan terdakwa. Pertanyaan pada (12) – (13) dikemukakan hakim oleh karena dimungkinkan informasi yang hendak digali tidak dituliskan di dalam BAP. Oleh karena itu, hakim menyampaikan pertanyaan dengan tujuan ingin menggali informasi perihal apa yang belum diketahuinya dan belum dicantumkan di dalam BAP.

Fungsi ini termasuk ke dalam kategori tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang menggambarkan usaha penutur untuk mendapat petutur agar melakukan sesuatu.

4.2.2 Mengonfirmasikan

Fungsi lain yang sering muncul dalam tuturan bertanya pada persidangan adalah fungsi mengonfirmasi. Fungsi ini dilakukan dengan tujuan meminta penegasan kembali atas jawaban yang telah disampaikan oleh mitra tutur. Berikut ini contoh penggunaan fungsi mengonfirmasi dalam persidangan.

(14) H : “**Yang mana yang keberatan?**”

J : “Yang tadi, bahwa saudara saksi mengatakan di bagian lain yang beliau diberikan
Saya nyatakan pemahaman daripada SK Bupati, tapi ya kalau memahami.”

Konteks: Tuturan hakim kepada jaksa pada persidangan pidana korupsi di PN Klaten.

(15) H: “Kejadiannya itu hari Selasa, tanggal 14 Desember, **betul ya?** Kira-kira jam 12 di kantor P dan K kecamatan Prambanan **ya?**”

S: “Ya.”

Konteks: Tuturan hakim kepada saksi pada persidangan pidana pencurian di PN Klaten.

Pada (14) dan (15) pertanyaan yang mengandung fungsi mengonfirmasi adalah “*Yang mana yang keberatan?*” dan *Kejadiannya itu hari Selasa, tanggal 14 Desember, betul ya?*. Dengan menyampaikan tuturan pertanyaan yang mengandung fungsi mengonfirmasi sebagaimana yang terdapat pada (14) – (15) di atas, hakim ingin meminta penegasan dari mitra tutur (jaksa dan saksi) terhadap jawaban yang telah disampaikan.

Fungsi ini juga dikategorikan ke dalam tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang menggambarkan usaha penutur untuk mendapat petutur agar melakukan sesuatu.

4.2.3 Meminta

Di samping fungsi mengonfirmasi, fungsi lain yang dapat ditemukan dalam rangkaian tanya jawab di persidangan adalah fungsi meminta. Maksud dari fungsi meminta adalah penutur meminta atau ingin agar mitra tutur melakukan apa yang diujarkan oleh penutur. Berikut ini contoh fungsi meminta yang terdapat dalam persidangan.

(16) H : “Sudah? **Dari penasihat hukum?**”

PH : “Apakah pada waktu saudara Padno melakukan laporan tertulis itu ngomong-ngomong dengan

saudara mengenai apakah laporan yang diterima ini telah memberikan tuntutan kemudian pada waktu membaca surat apakah ada bagian dari Saudara? Apakah uang 30 juta itu semuanya disimpan berupa uang begitu?"

S : **"Tidak."**

Konteks: Tuturan hakim kepada penasihat hukum pada persidangan pidana korupsi di PN Klaten.

Pada (16) tuturan bertanya yang berfungsi meminta adalah *Dari penasihat hukum?* Meskipun direalisasikan dalam bentuk pertanyaan, tuturan pada (44) sebenarnya dikemukakan dengan tujuan meminta mitra tutur, yaitu penasihat hukum, agar segera mengajukan pertanyaan kepada saksi. Lazimnya kesempatan ini didapat oleh penasihat hukum manakala jaksa telah selesai mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi.

Seperti halnya fungsi bertanya dan fungsi mengonfirmasi, fungsi meminta juga tergolong ke dalam tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang menggambarkan usaha penutur untuk mendapat petutur agar melakukan sesuatu.

4.2.4 Menyangsikan

Fungsi lain yang terdapat pada tuturan bertanya adalah menyangsikan. Fungsi ini disampaikan manakala seorang penutur merasa ragu atas informasi yang disampaikan oleh mitra tutur. Di bawah ini contoh penggunaan fungsi menyangsikan pada persidangan.

(17) H: "Ya, kalau kamu ndak ditangkap trus kamu tidur di situ coba. Kalau dia ndak punya uang sehingga nggak kamu ajak ke hotel. Coba kalau Dia, punya uang, kamu bawa ke hotel mana-mana itu. Itu akal bulusmu

itu kurang ajar. Karena uangnya sedikit ya nginapnya yang gratis. Sekolah. Kamu bisa leluasa malamnya. Coba kalau nggak ketangkap polisi. Nggak bisa apa maksudnya kamu nginap di situ? **Karena nggak punya uang?"**

T: "Wong tujuannya nggak di situ."

H: "**Tujuannya nggak di situ.**" "**Lha nyatanya di situ kok.**"

Konteks: Tuturan hakim kepada terdakwa pada sidang tindak pidana korupsi di PN Klaten.

Tuturan bertanya yang berfungsi menyangsikan pada (17) tampak pada tuturan *karena nggak punya uang?*. Meskipun tuturan *karena nggak punya uang?* pada (17) berbentuk pertanyaan, fungsi yang dikandung pada tuturan tersebut adalah menyangsikan. Dalam konteks ini, tuturan bertanya hakim yang terdapat pada (17) sebenarnya memiliki maksud menyangsikan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Hal ini dapat diketahui dari tuturan sebelumnya.

Fungsi menyangsikan berbeda dengan fungsi bertanya, mengonfirmasi, dan meminta. Fungsi ini tergolong ke dalam tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang menuntut penutur pada tindakan yang akan datang.

4.2.5 Menawarkan

Fungsi lain yang terdapat dalam persidangan fungsi menawarkan. Fungsi ini berarti penutur menawarkan sesuatu kepada mitra tutur perihal sesuatu hal. Berikut ini contoh penggunaan fungsi menawarkan dalam persidangan.

(18) H: " Menimbang..."

Saudara Teguh Santosa ya? Putusan yang telah diambil oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 8 bulan dipotong masa tahanan. **Diterima, banding, apa pikir-pikir?"**

T: "Pikir-pikir."

Konteks: Tuturan hakim kepada terdakwa pada sidang pidana korupsi di PN Klaten

Tuturan *Diterima, banding, apa pikir-pikir?* yang disampaikan hakim kepada terdakwa pada (18) adalah tuturan yang mengandung fungsi menawarkan. Meskipun tuturan tersebut direalisasikan dengan bentuk tanya, pada dasarnya fungsi yang dikandung adalah menawarkan. Fungsi ini dapat diketahui dari inferensi yang diambil berdasarkan tuturan *Saudara Teguh Santosa ya? Putusan yang telah diambil oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 8 bulan dipotong masa tahanan.* Berpijak dari tuturan tersebut maka dapat ditarik sebuah inferensi bahwa fungsi dari tuturan *Diterima, banding, apa pikir-pikir?* adalah menawarkan.

Fungsi menawarkan ini tergolong ke dalam tindak tutur komisif seperti fungsi menyangsikan. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang menuntut penutur pada tindakan yang akan datang.

4.2.6 Mengklarifikasi

Fungsi pertanyaan lain yang ditemukan di persidangan adalah fungsi mengklarifikasi. Fungsi ini dikemukakan oleh penutur dengan tujuan untuk menjernihkan atau menjelaskan kembali perihal apa yang telah disampaikan mitra tutur. Di bawah ini contoh penggunaan fungsi mengklarifikasi dalam persidangan.

(19) H: **"Ini yang masih dalam taraf apa? Dari dokter gimana masih dalam pengawasan? Masih observasi dari dokter? Masih pengawasan?"**

S: "Saat ini, saat ini sudah tidak."

H: "Sudah tidak. Cuma nanti kembali."

S: "Jadwal kontrolnya sudah habis."

Konteks: Tuturan hakim kepada saksi pada persidangan pidana kecelakaan lalu lintas di PN Klaten.

Tuturan yang mengandung fungsi mengklarifikasi pada (19) adalah *Ini yang masih dalam taraf apa? Dari dokter gimana masih dalam pengawasan? Masih observasi dari dokter? Masih pengawasan?*. Tuturan tersebut memang tampak sebagai tuturan bertanya. Namun tuturan tersebut pada dasarnya memiliki fungsi lain, yaitu mengklarifikasi. Dalam hal ini hakim sebagai penutur hendak mengklarifikasi atas jawaban yang telah disampaikan oleh mitra tutur yaitu saksi. Klarifikasi yang diinginkan adalah apakah saksi masih dalam taraf pengawasan atau observasi dokter.

Sebagaimana fungsi bertanya, fungsi mengonfirmasi, dan fungsi meminta, fungsi mengklarifikasi juga termasuk ke dalam tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang menggambarkan usaha penutur untuk mendapat petutur agar melakukan sesuatu.

5. Simpulan

Penelitian ini secara garis besar menyimpulkan dua hal. *Pertama*, bentuk kalimat tanya dalam persidangan di pengadilan wilayah Surakarta meliputi empat jenis, yaitu kalimat tanya biasa, kalimat tanya ya/tidak, kalimat tanya alternatif, dan kalimat tanya retorik. Pemarkah tanya pada kalimat tanya biasa *apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana*. Ihtwal kalimat ya/tidak dalam persidangan direalisasikan dengan bentuk penggunaan intonasi naik (intonasi 233), penggunaan kalimat tag. Kalimat tanya alternatif cenderung direalisasikan dengan

bentuk kalimat biasa. Adapun kalimat tanya retorik direalisasikan dengan kalimat tanya ya/tidak.

Kesimpulan *kedua* yang dapat dipaparkan di sini bahwa pertanyaan dalam persidangan mengandung enam fungsi. Enam fungsi tersebut adalah bertanya, mengkonfirmasi, meminta, menyangsikan, menawarkan, mengklarifikasi. Fungsi bertanya, mengkonfirmasi, meminta, dan mengklarifikasi tergolong ke dalam tindak tutur direktif. Sementara itu, fungsi menyangsikan dan menawarkan termasuk ke dalam tindak tutur komisif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhatia, V.K. 1983. "Simplification Vs Easification-The Case of Legal Texts" dalam *Applied Linguistics* 4.1.
- Bhatia. 1993. "Cognitive Structuring in Legislative Provisions" dalam *Language and The Law* (ed. John Gibbon). London: Longman.
- Djarmika dkk. 1999. *Strategi Memahami Teks Hukum: Sebuah Pendekatan Sistemik Fungsional* (Penelitian). Surakarta: Lemlit UNS.
- Djarmika dkk. 2001. *Memahami dan Mpermudah Teks Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt): Sebuah Analisis Wacana Sistemik Fungsional* (Penelitian). Surakarta: Lemlit UNS.
- Fasold, Ralph. 1996. *The Sociolinguistics of Language*. Blackwell Publisher Ltd.
- Holmes, Janet. 2001. *An Introduction to Sociolinguistics*. Pearson Education Limited
- Huang, Yan. 2007. *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Hudson, R.A. 1996. *Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 2007. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Leech, Geoffrey. 1983. *The Principles of Pragmatics*. New York: Longman Group Limited.
- Levinson, S.C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Marcellino. 1993. "Analisis Percakapan (Conversation Analysis): Telaah Tanya-jawab di Meja Hijau" dalam *PELLBA* 6. 1993. Bambang Kaswanti Purwo (ed.). Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- Moeliono, Anton M (penyunting penyelia). 1997. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Ramlan, M. 2001. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV Karyono
- Rani, Abdul, Bustanul Arifin, Martutik. 2006. *Analisis Wacana Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia
- Richards, Jack, John Platt, Heidi Weber. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. Essex: Longman
- Searle, John R. 1979. *Speech Act An Essay in The Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Thomas, Jeny. 1996. *Meaning in Interaction*. London/New York: Longman.
- Triwati Rahayu. 2004. *Analisis Register Akta Otentik*. (Tesis). Yogyakarta: Univesitas Gajah Mada.
- Tsui, Amy. 2002. "A Functional Description of Question" dalam Malcom Coulthard *Advanced in Spoken Discourse Anaylisis*. London: Rouletdge
- Yule, George. 1996. *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.